

BENANG HIJAU PROFESI & PROFESIONALISME

Oleh: Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR RI)

Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda tentang profesi dan profesionalisme, terkait dengan latar belakang, pendidikan dan kegiatan yang bersangkutan. Tidak ada kitab suci dalam profesi dan profesionalisme, pemahaman setiap orang harus dihargai, dan tidak sebaliknya membuat dikotomi atau benturan-benturan.

Apapun pemahaman itu, profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan seseorang, sebuah "pekerjaan" yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Sedangkan profesionalisme yang memayungi profesi tersebut adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi, pemikiran, gairah untuk terus-menerus secara dewasa (*mature*), secara intelektual untuk terus meningkatkan kualitas profesi mereka. Profesionalisme menjadi dorongan internal. Dorongan ideologis sebuah proses perbaikan dalam profesi yang bersangkutan. Profesionalisme secara luas terkait dan konsisten dengan profesi itu sendiri.

Dalam "dunia spesialis", seseorang bisa memahami profesi sebatas posisi tertentu. Misalnya dokter, guru, akuntan, politisi, hingga ibu-rumah tangga. Tetapi seseorang bisa memaknai profesi lebih luas dari itu. Secara personal, saya memahami profesi sebagai pekerjaan untuk melayani umat, meningkatkan kualitas bangsa, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini menjadi *benang hijau* dari segala profesi yang pernah saya kerjakan. Mulai dari seorang akademisi, muballig, dai, relawan hingga politisi.

Dari setiap fase pekerjaan itu, sikap profesionalisme membantu untuk mengembangkan kualitas diri secara terus-menerus. Dan

proses peningkatan kualitas tersebut bisa dilakukan dalam banyak hal, mulai dari membaca, mendengar, hingga berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Terlebih dalam posisi seorang politisi, benang hijau untuk memberdayakan umat, bangsa dan masyarakat terlihat amat jelas. Juga dengan tuntuan yang amat besar.

Hari ini, analog dalam “dunia ensiklopedi”, jarang seseorang hanya menekuni satu profesi dalam satu waktu. Seorang yang terlibat dalam ikatan organisasi profesionalisme misalnya (IDI, IAI, dll), tetap memerlukan ruang pilihan aktivitas lainnya. Setidaknya berinteraksi dengan masyarakat sekitar, menjadi ketua RT, kelompok arisan, takmir masjid dll. Itu semua sangat manusiawi. Itu akan membuat kepribadian seseorang tidak terkotak-kotak, meskipun dalam situasi tertentu ada keperluan untuk menjadi spesialis. Tetapi sekali lagi, pemahaman ini tergantung dengan latar belakang, pendidikan dan kegiatan yang bersangkutan. Tidak perlu dikotomi dan tidak perlu diperdebatkan.

Profesi Politisi

Membicarakan profesi politisi, kasusnya serupa. Ada seseorang yang memang secara spesifik memilih politisi sebagai “profesi”-nya. Terpilih lebih dari empat periode sebagai anggota Dewan, menghabiskan hampir separuh usianya sebagai wakil rakyat. Ada pula yang memiliki beragam pilihan pekerjaan sebelum datang ke Senayan. Apapun itu, seseorang harus memahami dengan baik prioritas dari berbagai pekerjaan yang digelutinya. Tidak boleh mencampur-adukkan semuanya. Terlebih saat tuntutan profesi anggota dewan menjadi lebih besar dibandingkan pilihan pekerjaan lainnya.

Ketika seseorang menjadi anggota dewan, maka dia paham benar profesinya sebagai wakil rakyat. Dan kode etik terpenting dari seorang anggota dewan adalah menjadi wakil rakyat. Bukan wakil golongan, partai, konstituen, atau malah wakil diri-sendiri.

Dalam masa pendewasaan dewan saat ini, dalam banyak kesempatan seorang anggota dewan tetap dinilai merepresentasikan konstituennya. Sepanjang apa yang ditagih konstituennya tidak dalam rangka dikotomi, mengadu domba, hal ini tidak keliru. Apalagi jika bisa disinergikan dengan tuntutan konstituen kepada anggota dewan lainnya. Itu artinya secara akumulatif seluruh rakyat Indonesia terlayani.

Ketika profesi politisi dipahami dari sudut pandang benang hijau, ada banyak sekali kesempatan yang dimiliki seorang anggota dewan untuk membantu memberdayakan umat, bangsa dan masyarakat. Fungsi legislasi misalnya. Anggota dewan bisa menangkap *kegelisahan* masyarakat dan berjuang untuk itu. Rancangan UU Pornografi-Pornoaksi dan berbagai produk legislasi lainnya jelas akan membantu kehidupan masyarakat lebih baik dan bermartabat. Fungsi legislasi ini termasuk juga dalam proses koreksi legislasi yang ada. Anggaran 20% pendidikan dalam APBN misalnya, anggota dewan harus terus memperjuangkannya bukan hanya untuk kepentingan konstituennya bahkan untuk seluruh masa depan Indonesia.

Anggota dewan juga memiliki hak kontrol. Memastikan pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan baik. Pemerintahan yang bebas korupsi. Anggota dewan juga memiliki hak *budgeting*, melakukan koreksi atas anggaran duplikatif, memastikan maksimalisasi sekaligus efisiensi anggaran negara dilakukan. Tapi semua fungsi dan hak ini merupakan proses panjang. Pekerjaan besar. Dan untuk itu diperlukan kenegerawanan anggota dewan dan masyarakat.

Penting menyebutkan "kenegarawanan" masyarakat karena ini terkait dengan penilaian selama ini. Secara umum anggota dewan memiliki semangat besar untuk memperbaiki kinerja mereka. Dan ini perlu diapresiasi, di dorong agar dilakukan tanpa kenal lelah, *istiqamah*. Dalam banyak kasus memang ada hal yang tidak bisa mereka hindari, tapi tidak dengan segera melakukan generalisasi dan menilai mereka semua buruk. Semua upaya peningkatan kualitas memerlukan proses.

Tantangan Anggota Dewan

Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi anggota dewan saat ini, yang pertama adalah proses demokrasi transisional. Kita sudah memiliki banyak praktek-praktek demokrasi yang baik, tapi etika dan aturan belum membantu banyak. Pelaksanaan undang-undang berdemokrasi yang baik belum menjadi bagian penting.

Contoh sederhana adalah pilkada. Prestasi kita melaksanakan pilkada sejauh ini luar-biasa, tapi masih ada sisi-sisi yang membuat pesta demokrasi itu cacat. *Money politics* misalnya. Seharusnya UU Pilkada yang ada secara lugas dan jelas mengatur tentang sanksi keras pelaku *money politics*, seperti likuidasi parpol maupun calon yang bersangkutan. Etika dan aturan yang baik jelas akan membuat praktek demokrasi yang kita lakukan menjadi lebih baik. Masih terkait dengan contoh pilkada, ancaman sanksi berat atas *money politics* secara tidak langsung juga akan memutus lingkaran setan korupsi. Pemimpin yang memenangkan posisinya dengan uang, tidak akan pernah menjadi pemimpin yang bersih. Dia bahkan akan menuntut "bunga-bunga" dari modal yang dikeluarkannya. Demikian juga sebaliknya.

Tantangan yang kedua adalah dualisme posisi anggota dewan. Di satu pihak anggota dewan jelas wakil rakyat, bukan wakil partai. Tapi "kendaraan" yang mengantarkannya ke Senayan adalah partai politik. Dulu hak *recall* mengundang perdebatan panjang. Anggota dewan yang konsisten membela kepentingan rakyat tapi bertentangan dengan haluan parpol-nya banyak yang menjadi korban. Tapi saat hak *recall* dihilangkan, justru lebih banyak lagi anggota dewan yang aneh-aneh. Tidak jelas perannya, bukan wakil rakyat, juga bukan wakil partai. Hanya menjadi wakil kepentingan diri sendiri.

Dalam situasi, ini semua pihak (terutama anggota dewan yang bersangkutan) harus menyadari sangat diperlukan independensi yang bertanggung-jawab. Pendewasaan dalam tingkah-laku. Partai politik juga harus memastikan kalau anggota yang dikirimkannya benar-benar memperjuangkan rakyat. Disadari atau tidak kinerja anggota dewan mencerminkan kinerja parpol itu sendiri, dan juga kinerja dari para pemilihnya.

Tantangan yang ketiga adalah cara pandang rakyat dan media. Rakyat yang dipengaruhi oleh media sering melakukan generalisasi terhadap seluruh anggota dewan. Media lebih suka menampilkan tontonan Sidang Paripurna. Meng-*close-up* wajah-wajah tertidur. Tapi tidak memberitakan betapa melelahkan malam-malam sebelumnya saat anggota dewan yang bersangkutan bersidang di komisi-komisi, BURT, BKSAP dan sebagainya.

Rakyat dengan pemberitaan media yang proporsional bisa melihat anggota dewan sekarang bukan hanya tukang stempel. Dibandingkan periode-periode sebelumnya, anggota dewan sekarang cukup dinamis. Dalam pembahasan hak angket impor beras, dinamika pembahasan anggota dewan luar biasa. Tapi demokrasi mengenal mekanisme pengambilan keputusan voting dan jelas itu hanya terkait dengan jumlah suara. Hasilnya mungkin mengecewakan banyak pihak. Tapi lihatlah prosesnya: Betapa alot perdebatan yang terjadi. Dan sekali lagi rakyat dan media tidak bisa me-generalisir seluruh anggota dewan, karena ini tidak akan membantu kinerja anggota dewan dalam peningkatan kualitas menjadi wakil rakyat.

Media harus lebih berimbang, tidak menggunakan standar ganda. Saat pembahasan calon panglima TNI, bukankah hak *fit and proper test* yang dilakukan anggota dewan malah dituduh oleh media massa terkesan bertele-tele? Soal media ini menjadi tantangan besar bagi politisi, mengingat politik amat terkait dengan media. Sekalipun kita belum memiliki iklim media-massa yang lebih baik, anggota dewan tentu diharapkan tidak mundur, apatis, patah-hati, patah-arang karena plesetan, dan ketidakadilan informasi yang terjadi. Mereka harus terus melakukan introspeksi internal untuk meningkatkan integritas dan kompetensi mereka. Badan Kehormatan juga harus terus bekerja maksimal. Membantu proses perbaikan tersebut.

Integritas & Kompetensi

Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jika isu integritas dan kompetensi disandingkan, integritas jauh lebih penting bagi seorang politisi. Masyarakat yang masih paternalistik,

mementingkan fisik. Peng-idola-an mereka melihat integritas (dengan segala pengertiannya) sebagai basis rasionalitas dan sekaligus emosionalitas memilih, dan dalam level tertentu bisa mengabaikan kompetensi yang bersangkutan.

Pemilihan anggota DPD misalnya, seharusnya dipahami masyarakat bukan sekadar *pemilihan tokoh masyarakat*, tetapi kenyataan umumnya demikian. Anggota DPD jelas membutuhkan integritas tubuh yang prima, kecerdasan, citra diri dan lincah untuk melaksanakan fungsi besarnya mensukseskan lembaga negara yang baru ini. Anggota DPD membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan besarnya. Jalan keluarnya bisa saja dengan mekanisme pembahasan dari staf ahli, *think-tank*. Tapi ada banyak isu kompetensi yang tidak bisa ditambal-sulam sesederhana itu. Ke depan, integritas dan kompetensi harusnya menjadi dua isu yang sama pentingnya. Berhimpitan dan saling menopang.

Apatisme publik terhadap kinerja politisi dan permasalahan besar yang melilit bangsa ini secara tidak langsung membuat masyarakat berharap banyak pada figur yang memiliki integritas tinggi. Figur yang diharapkan bisa memunculkan *public-trust*. Ini tidak salah. Integritas sudah semestinya menjadi payung besar, mata air bagi seseorang yang mengemban profesi politisi. Tapi integritas saja tidak cukup. Diperlukan kompetensi. Integritas *is important factor, but not sufficient*.

Ada kasus menarik, seseorang yang selama ini dalam masyarakat sudah dikenal memiliki integritas dan kompetensi baik, ketika terjun ke dunia politik nama baiknya perlahan mulai tercoreng akibat ketidakprofesionalan yang prima. Apalagi dengan stigma negatif yang sering dimunculkan dalam masyarakat tentang anggota dewan baik oleh media maupun kalangan eksekutif.

Semua pihak harus menyadari isu integritas yang luntur ini bukan hanya monopoli anggota dewan. Hampir seluruh profesi yang memiliki rivalitas tinggi misalnya, bisa mengkondisikan seseorang untuk "berubah". Seseorang yang memiliki integritas yang baik jelas menyadari kalau situasi yang dihadapinya adalah sebuah tantangan, bukan sebaliknya. Tapi ini tidak mudah. *Rule of thumb-*

nya: dia harus memahami kalau dia tidak seorang diri untuk mengalahkan faktor-faktor negatif tersebut. Dia tidak berada sendirian di pulau terpencil, dengan angin kencang dan badai yang dahsyat. Karena dengan merasa sendiri sekuat apapun yang bersangkutan pasti akan terhempas juga.

Dia harus memahami kalau dia bukanlah satu-satunya yang menginginkan dan bisa melakukan perubahan. Saling menyemangati dan menguatkan akan membuat proses itu berjalan lebih mudah. Entah itu memilih menjadi arus baru sebuah perubahan, atau mengkomunikasi diri dengan kebiasaan lama, melakukan penyesuaian positif. Begitu pula dalam profesi politisi, yakinlah tidak semua anggota dewan buruk. Ada lebih banyak yang memiliki kebanggaan atas profesi ini. Dengan memberikan apresiasi, waktu, dan kesempatan, proses perbaikan itu akan terus berjalan dengan baik.

Profesi dan Profesionalisme

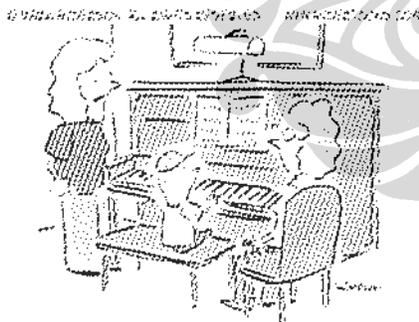
Terakhir, penting dimengerti bagi siapapun yang saat ini sedang menyiapkan pilihan profesi dan profesionalisme, entah itu menjadi seorang akuntan, ekonom, politisi, birokrat dan sebagainya, ada beberapa pemahaman penting yang harus dimiliki yang bersangkutan. Yang pertama apapun pilihannya, seseorang harus mengenali kemampuan dan kemauan dirinya. Kemampuan bisa didapat, tetapi kemauan terkadang tidak bisa dipaksakan. Hanya orang-orang yang lega dengan kemampuan dan kemauan dirinya-lah yang bisa menikmati sebuah profesi.

Yang kedua yakinlah setiap apa yang dipilih secara sadar, sekecil apapun itu pasti bermanfaat. Jangan pernah setengah-setengah. Lakukanlah dengan serius. Yang ketiga bacalah biografi tokoh-tokoh yang *gagal* dan sukses dari profesi yang hendak kita tekuni. Tahu mekanisme dan proses mereka. Mengerti faktor-faktor sukses dan gagal mereka. Dan yang lebih penting lagi bisa memahami kebanggaan atas profesi yang mereka pilih.

Yang keempat terus meng-*up-date* diri dengan informasi yang terkait dengan profesi tersebut. Hari ini, ketika teknologi

informasi memungkinkan banyak hal, seseorang bisa terus tahu apa saja yang berkembang di sekitarnya. Dan di era globalisasi ini sebagai professional tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. Yang kelima adalah membentuk *network*, jaringan. Bukan dengan tujuan negatif, tapi dengan semangat meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Meningkatkan kesempatan positif yang ada dan membangun komunitas yang saling menguatkan.

Dari kelima hal penting tersebut, sebagai pondasi, semuanya harus dipayungi oleh pemahaman bahwa apapun profesi yang dipilih, kita tetap percaya dengan Tuhan, Allah Yang Maha Esa atas seluruh proses tersebut. Mengenali Tuhan sama mengenalinya kita terhadap profesi tersebut. Terus beribadah secara vertikal dan horizontal. Ini semua akan menjaga integritas, semangat dan moralitas. Hingga ketika yang bersangkutan siap menerjuni sebuah profesi, maka masyarakat kita akan dipenuhi oleh orang-orang yang profesional yang jiwanya tidak lagi terkotak-kotak dan terbelah belah. Dan janji kehidupan yang lebih baik dan bermartabat itu bisa terwujud. Semoga. (***)



"How expensive would it be to just skip practice and get right to perfect?"

John Grisham, pengarang novel hukum terlaris memperoleh gelar sarjana akuntansi dari Mississippi State University.
